



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Ada Ketidakseriusan di Ruang Garam



Bak Pahlawan



Siapa yang tak pernah membeli garam? Atau pertanyaan sederhana lainnya, bagaimana jika di dunia ini tak pernah ada garam? Tentu akan banyak makanan, hidangan dan kudapan lainnya yang hambar dan tak enak dinikmati.

Meski hanya sedikit, dan melebur bersamaan dengan makanan yang diolah, peran garam bak pahlawan dalam membuat makanan menjadi enak, pas hingga gurih. Namun sudahkah kita mengetahui bagaimana pembuatan garam sebelum sampai ke warung-warung terdekat rumah. Berapa harga saat kita membeli di warung? Seribu? dua ribu?

Sebelum berada di warung terdekat rumah atau pun mini market, garam tak lepas dari peran petani garam. Mereka adalah kunci. Mengapa saat ini kita masih menikmati rempah-rempah

buih laut itu. Butuh sehari-hari lamanya, air laut pilihan itu diolah para petani garam.

Kabupaten Cirebon, yang berada dekat dengan laut utara pun tak luput menjadi salah satu wilayah yang sebagian masyarakatnya melabuhkan diri menjadi petani garam. Namun apakah garam dapur kita sendiri berasal dari Cirebon? atau berapa besar produksi garam dan seberapa baik kualitas garam di Kabupaten Cirebon sendiri?

Oleh karena itu, pada edisi kali ini, Cirebon Katon tertarik menyajikan informasi terkini kondisi garam bagi para pembaca budiman. Kami ingin para pembaca setia dapat mengetahui ihwal produksi garam di Kabupaten Cirebon.

Bertepatan dengan November, kami Redaksi Cirebon Katon mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Selamat membaca Cirebon Katon.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Garam di Cirebon
Tinggi Potensi Rendah Produksi

6 | Ketua Komisi II Usulkan BUMD Garam



14 | KILAS

Bangkar Bahas Rancangan APBD 2022



18 | PUBLIKA

Mohon Tertibkan Aktifitas Geng Motor



20 | INSPIRASI

Neng Alena Empon-Empon
Resep dari Youtube Kini Tembus Minimarket



22 | LENSA

Melawan Ombak dan Maut



24 | PROFIL

Hasan Basori
Sempat Profesi Konsultan Hingga Pengusaha Sawit

28 | DINAMIKA

Komisi I Kaji Pengelolaan Informasi Publik

30 | Komisi II Janji Usut Pembenahan Parkir Gunung Jati

32 | Komisi III Tinjau Perbaikan Jalan Paburan-Ciledug

34 | Pansus I Studi Banding Penanganan Pandemi

36 | POTENSI

Balung Biru Cilandung
Agar Tak Hilang Pengunjung, Berharap
Perbaikan Akses Jalan



38 | DESA

Gebang Kulon
Bangun Panorama Unik Instagramble

Garam di Cirebon Tinggi Potensi Rendah Produksi

Meski memiliki potensi wilayah penghasil garam yang besar. Kualitas produksi dan NaCl garam di Kabupaten Cirebon dinilai rendah sehingga tak layak terserap industri. Mengapa bisa terjadi?



Sejak berabad-abad lalu garam digunakan untuk bumbu penyedap dan pengawet makanan. Seiring dengan kemajuan peradaban, garam digunakan sebagai salah satu elemen penting berbagai macam industri. Masyarakat di wilayah pesisir memilih bermata pencaharian hidup sebagai petambak garam rakyat.

Kabupaten Cirebon yang berada di utara Provinsi Jawa Barat dengan garis pantai sepanjang 77,97 kilometer pun tak ketinggalan, menjadi wilayah dengan potensi produksi garam yang besar.

Sebagaimana laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015 silam, Kabupaten Cirebon sempat tercatat menjadi salah satu penyumbang garam terbesar di Indonesia, dengan jumlah produksi yang mencapai 435 ribu ton dalam setahun dari tambak garam.

Tambak garam Cirebon tersebar di beberapa tempat dari Gebang Kulon, Playangan, Pangenan, Kanci, Losari, Astanajapura, Gunungjati, Mundu,

Suranenggala hingga Kapetakan. Dengan total luas wilayah mencapai 1.557 hektare.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon melaporkan, jumlah petani garam saat ini tercatat 3.020 orang serta 120 kelompok usaha garam rakyat (Kugar). Namun tersisa 37 Kugar yang hingga saat ini masih aktif. Itu pun hanya 17 Kugar yang sempat mendapat sumber bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 hingga 2021.

Saat ini para petambak garam di Kabupaten Cirebon hampir rata-rata masih menggunakan media tradisional seperti penggunaan sinar matahari (*solar evaporation*). Juga dalam menggiring air masih memakai kincir angin yang terbuat dari kayu. Garam hasil dari proses pengeringan air laut ini yang sering dijumpai dan dianggap mudah diproduksi.

Secara alur proses pembuatan, para petambak biasanya membuat aliran air laut agar bisa masuk dalam bedengan yang sudah disiapkan. Saluran air di dalam bedengannya pun di buat zig-zag supaya rata.



Proses pembuatan garam awalnya memang sama, perbedaan antara para petambak garam tradisional dengan yang sudah menggunakan teknologi terletak dalam penggunaan alas. Petambak tradisional tak memberi alas apapun sehingga tembus ke tanah langsung. Akibatnya mereka perlu dua kali mengaliri air.

Jika dilihat dari segi proses waktu pun, antara petambak garam tradisional dan yang sudah memakai teknologi seperti geomembran terpaut 2 hingga 4 hari. Memakai geomembran bisa memakan waktu 7 hari, karena menghasilkan garam berkualitas tinggi. Sementara petambak garam tradisional hanya membutuhkan waktu 3 hari. Baru setelah itu panen.

Pasalnya harga geomembran

bagi petambak tradisional Cirebon dinilai cukup mahal. Untuk satu gulungan dengan ukuran 4x40 meter persegi bisa mencapai Rp 2,5 juta. Alasan lainnya, mereka tak mau menunggu waktu lama karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Dalam setiap tahunnya, umumnya para petambak garam Cirebon mulai memproduksi garam pada bulan Agustus hingga November. Alih-alih lancar, mereka juga seringkali mengalami gagal panen ketika cuaca tak mendukung.

Akibatnya data produksi garam di Kabupaten Cirebon cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 misalnya, jumlah produksi mencapai 2.670 ton sementara hingga September 2021 hanya mampu menghasilkan 142 ton.

Perbedaan itu, tak terlepas

dari persoalan iklim maupun pasangunya air laut (rob) yang merendam lahan garam sehingga sangat berpengaruh terhadap mutu dan hasil garam.

Selain hasil produksi yang tak pasti, harga garam di Kabupaten Cirebon pun dinilai tak besar. Pada 2020 garam hanya dihargai Rp 250 hingga Rp 500 rupiah per kilonya. Sementara pada 2021 angkanya sempat naik meski sedikit, yakni dari Rp 400-900 rupiah per kg.

Harga garam yang rendah, tak terlepas dari kualitas garam. Pasalnya rata-rata kandungan Natrium Klorida (NaCl) di Kabupaten Cirebon hanya 85-92 persen saja. Akibatnya garam hanya mampu untuk dikonsumsi atau dijual langsung. Sementara untuk bisa diserap di sektor industri, dibutuhkan garam Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan NaCl 94,7 % dan kadar air maksimal 7 %.

Persoalan tersebut membuat para petani garam harus terbiasa menelan pil pahit dengan harga garam yang jauh dari layak. Belum lagi pada tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk impor garam sebesar 3,07 juta ton. Akibatnya sangat mempengaruhi pada stok garam di Kabupaten Cirebon yang belum terserap per September 2021 yang jumlahnya 20 ribu ton lebih.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon juga belum bisa berbuat banyak. Terlebih Kasi Perikanan DKP Kabupaten Cirebon sebagai *leading sector* baru saja dimutasi.

"Sementara ini saya juga baru. Jadi baru melakukan pembinaan agar bisa meningkatkan kualitas garam saja," kata Kasi Perikanan DKP Kabupaten Cirebon Hery Sumadi. •**Lan**

Ketua Komisi II Usulkan BUMD Garam

Sulitnya penyerapan garam hingga harga yang tak menentu menjadi sederet persoalan yang tak kunjung selesai. Ketua Komisi II pun usulkan pendirian BUMD industri garam. Tepatkah?



Terik matahari menyengat kulit Muqoyyim, salah satu petani garam Desa Bendungan. Matanya menatap. Tertuju pada kolam-kolam garam miliknya. Sebagian ada yang sudah berbuih menjadi kristal dan tinggal menunggu kering. Berharap cuaca tetap cerah agar dapat dipanen seminggu lagi.

Harapan cuaca membaik, bukan tanpa alasan. Pasalnya Muqoyyim seringkali mengalami gagal panen, lantaran diguyur hujan tiba-tiba. Meski be-

gitu ia tak akan berhenti menjadi petambak garam.

“Kalau sekarang tidak menambak garam, keluarga saya tidak bisa makan. Lahan padi saya belum bisa digarap karena belum musim penghujan,” ucap Muqoyyim, yang sudah puluhan tahun menambak.

Di Desa Bendungan, garam umumnya dipanen selama empat bulan: Agustus, September, Oktober dan November. Di luar bulan itu, Muqoyyim akan beralih menjadi petani padi.

Namun, bulan November 2021 ini, Muqoyyim tak merasa senang. Sebab, hujan seringkali mengguyur mendadak. Ia mengeluh, dua tahun kebelakang ini cuaca tak dapat diprediksi.

“Kalau hujan, tambak saya banyak yang bocor. Banyak lubang ular atau belut. Sehingga antara air muda dan air tua yang siap jadi garam tidak bisa dibedakan. Ini yang membuat tambak garam saya sering gagal panen,” ujarnya.

Muqoyyim menambak ga-



Heri Sumadi

ram di lahan seluas setengah hektare yang ia sewa dengan cara tradisional. Biasanya ia memanen dalam seminggu dua kali. Muqoyyim mendapatkan rata-rata satu setengah ton sekali panen. Jika ditaksir, dalam setahun ia mampu menghasilkan 10 hingga 30 ton.

“Menyesuaikan cuaca. Tahun kemarin saya hanya mendapat 10 ton garam. Banyak yang gagal panen,” kata Muqoyyim.

Meski mendapat belasan hingga puluhan ton, Muqoyyim

harus menelan pil pahit karena garam yang ia panen hanya dihargai ratusan rupiah per kilonya. Dua tahun belakang ini, garam seperti tak asin lagi baginya. Sebab harganya begitu anjlok luar biasa. Belum lagi hasil penjualannya ia harus membagi dua dengan pemilik lahan. Sehingga hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

“Sekarang harganya sedang 500 rupiah. Tahun kemarin garam di desa saya sampai Rp 250. Makanya petambak lain yang

menyewa seperti saya malas menggarap,” katanya.

Anjloknya harga garam juga dirasakan para petani di Desa Ambulu, Kecamatan Losari. Pada 2020 lalu, garam hanya dihargai 125 rupiah. Sementara di Rawaurip, Kecamatan Pangenan, bahkan pernah dibanderol 150 rupiah per kilogram. Meskipun, saat ini telah naik seharga 500 rupiah per kg.

“Masih mending, sekarang lagi naik tetap saja terbilang murah. Tahun kemarin garam di desa Rawaurip hanya dihargai 150 rupiah,” jelas Kasna, pertambak garam asal Rawaurip.

Bagi Muqoyyim dan Kasna, mereka hanya punya harapan kepada pemerintah, agar dapat mengontrol harga garam yang dirasa layak.

“Bisa tidak harga ditentukan oleh pemerintah. Jangan sampai harga 200 rupiah. Kalau bisa dihargai 1000 rupiah. Atau minimalnya 800 rupiah. Pemerintah minta produksi garam kita bagus. Tapi tantangan kita ada di cuaca,” terang Kasna.

Mutu Garam Rendah

Menjawab itu, Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon melalui stafnya Roby Sanjaya mengakui jika harga garam belum dapat dikontrol. Hal itu tidak lain karena harga garam ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya secara tidak langsung membuka ruang kepada kartel untuk menentukan harga sesuai keinginan pengusaha.

Meski demikian, Roby telah berupaya membantu memfasilitasi MoU antara industri dengan para petambak pada tahun 2017 silam agar penjualan garam dapat

diserap. Namun pertemuan tersebut tak membuahkan hasil, lantaran petambak menginginkan harga yang tinggi.

“Pada saat itu memang kami sudah mendorong industri supaya harga garam tinggi, namun hasilnya masih ditolak para petani karena dirasa bagi mereka harganya belum sesuai keinginan,” jelas Roby.

Roby pun mengungkapkan, jika penyebab harga murah garam di Kabupaten Cirebon disebabkan kadar NaCl garam di bawah 85 persen. Akibatnya tak bisa diserap industri dan hanya bisa menjadi garam konsumsi.

“Padahal salah satu pabrik industri di Pangenan, Indofood misalnya, mereka membutuhkan garam dengan NaCl di atas 85 persen. Kalau saja garam di Cirebon bagian timur punya NaCl bagus pasti akan dihargai mahal,” ungkap Roby.

Rendahnya kadar NaCl garam di bawah 85 persen, kata Roby, disebabkan karena garam di Kabupaten Cirebon tercampur dengan tanah. Hal itu banyak ditemui di Kecamatan Pangenan, Gebang hingga Losari.

Berbeda dengan kualitas garam SNI dengan kadar NaCl 94,7 persen tidak tercampur dengan tanah karena pengolahannya dilapisi geomembran. Seperti di Desa Bungko, Kecamatan Kaptakan. “Jadi hanya garam Desa Bungko yang sudah bisa masuk ke industri Indofood karena kualitasnya kelas I. Harganya juga di angka Rp 2500 per kilogram. Sedangkan yang lain belum bisa masuk,” tutur Roby.

Sementara untuk meningkatkan kualitas garam, mantan Kepala Bidang Budidaya Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon Yuliah Harwati mengungkapkan sempat mem-



Roby Sanjaya

berikan bantuan kepada 3 kelompok petambak garam pada tahun lalu berupa geomembran (terpal) sebanyak 25 gulung dan rumah tunnel sebanyak 2 unit dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Percuma Pakai Rumah Tunnel

Penggunaan sistem rumah tunnel sebenarnya telah dipraktikkan salah satu petambak garam di Tawang Sari bernama Judin. Pria paruh baya itu menjelaskan jika ia telah menggunakan

alat rumah tunnel seluas 4,4 x 50 meter. Hasilnya pun sangat memuaskan.

“Dengan modal Rp 7 juta, sudah bisa membuat rumah garam tunnel berukuran 4,4 x 50 meter. Rinciannya, plastik satu gulung ukuran 4,4 x 50 meter Rp 3 juta, bambu Rp 3 juta dan plastik atap Rp 1 juta. Hasilnya, kadar garam mampu mencapai 97 NaCl dan mampu produksi hingga 6 ton lebih per 12 hari,” jelas Judin.

Namun, kini Judin tak lagi menggunakan rumah tunnel lantaran harga garam setelah panen tetap saja dihargai murah. Yak-



Mad Saleh

ni Rp 200 rupiah per kilogram. Ia pun terpaksa menjual rumah tunel prisma.

“Saya pernah praktik rumah garam tunel, tetapi tidak dilanjutkan. Kalau garamnya tidak ada harganya untuk apa beli peralatan garam rumah prisma,” sesalnya.

Di tengah cuaca dan harga garam yang tak menentu, para petambak garam juga memiliki persoalan lain. Puluhan petambak garam di Rawaurip terpaksa menggulung ratusan lahan tambak garam setelah diserang banjir rob akibat abrasi pantai dan rusaknya tanggul pembatas. Hanya puluhan hektare saja yang masih bertahan.

Akibatnya puluhan petambak garam di Rawaurip tak lagi mau menggarap lahan dan memilih merantau ke kota.

“Sekarang cuaca sudah tidak bisa ditebak. Biasanya serangan rob hanya terjadi di pertengahan bulan. Tapi dua tahun belakang ini, dari awal sampai akhir bulan, banjir rob besar terus,” tutur

Kasna.

Empat tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Cirebon sempat membangun tanggul pantai di Desa Rawaurip. Sayangnya hanya bertahan 2 tahun, setelah itu kondisi tanggul kembali amblas.

Banjir rob juga sering terjadi di Desa Tawang Sari. Perbedaannya, para warga memiliki kebiasaan tanam mangrove meski saat ini tak rimbun seperti semula.

“Tidak ada solusi lain yang terbaik dalam menangkal abrasi selain mangrove. Tapi persoalannya mangrove justru dirusak. Irigasi dikeduk jadi tanggul. Padahal, tanggul rentan amblas karena terus mengikis digerogeti air laut,” jelas Judin.

Judin pun berharap, agar Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menggencarkan gerakan tanam mangrove di kawasan pesisir desa-desa di Kabupaten Cirebon.

“Saya juga berharap ada aturan untuk hutan lindung, agar hutan mangrove yang ada di tepi pantai tetap terjaga dan tidak dirusak,” pintanya.

Sementara itu, Kasi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan Hery Sumadi yang bertanggungjawab sebagai *leading sector* garam pun tak dapat berbuat banyak. Saat ini ia masih belum tahu kondisi lapangan, karena baru saja menjabat setelah sebelumnya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Saya masih meraba, karena saya belum melakukan pengecekan ke kelompok-kelompok garam. Rencananya pengecekan dimulai minggu depan,” tuturnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh menilai, Pemda Kabupaten Cirebon belum serius memperhatikan nasib petambak garam. Terutama mengenai harga yang tak layak, sekalipun kebijakannya ditentukan pemerintah pusat melalui mekanisme pasar.

Oleh karena itu, Mad Saleh berpendapat perlunya pendirian perusahaan garam di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyerap garam para petambak.

Dengan adanya BUMD, kata dia, produksi garam petani akan diserap perusahaan BUMD. Dengan kata lain, akan ada payung hukum untuk menentukan harga garam Kabupaten Cirebon secara layak dan mengatur harga terendah. Selain itu, tentu akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

“Melihat aturan, jika garam ditentukan pemerintah pusat melalui mekanisme pasar. Maka bisa tidak jika mendirikan BUMD lalu Pemkab buat regulasi. Sebab kalau tidak dijadikan BUMD, pemda tentu tak bisa buat perda yang dapat mengatur harga garam dan sebagainya,” pungkasnya. •Muiz/Soy

Andalkan Program Pembinaan

Dinas Ketahanan Pangan mengaku hanya mampu mengandalkan program pembinaan untuk tingkatkan mutu garam, lantaran tak miliki kewenangan.



Pemkab Cirebon menilai kualitas garam di Cirebon yang belum memenuhi standar industri, menjadi faktor paling besar mengapa garam Cirebon hanya diserap menjadi garam konsumsi. Dimana rata-rata kandungan NaCl hanya di kisaran 85 sampai 92 persen.

Meski begitu, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon mengaku, telah berupaya mendorong para petambak garam agar dapat meningkatkan kualitas dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Tujuannya, agar NaCl garam dapat ditingkatkan.

“Minimalnya harus sepuluh

hari di meja garam. Meja garamnya pun harus menggunakan alat yang memadai seperti plastik geo membran supaya kualitasnya lebih bagus,” ujar Kasi Pengelolaan Hasil Perikanan dan Pengawasan DKP Kabupaten Cirebon Hery Sumedy.

Hery menerangkan, jika DKP hanya memiliki kewenangan berupa pembinaan bagi kelompok usaha garam (Kugar) dengan cara *sharing* dan meringankan biaya kebutuhan tambak garam. Saat ini pun telah terbentuk 120 Kugar di Kabupaten Cirebon.

“Kalau pembinaan berjalan dengan rutin. Kita mengunjungi daerah ketika musim tanam ga-

ram,” terangnya.

Selain pembinaan, Hery mengatakan belum ada program yang berjalan dari DKP. Apalagi, ia juga baru saja dilantik dan terbentur dengan pandemi, sehingga belum dapat berbuat banyak.

Sementara untuk program bantuan bagi para petambak garam, kata Hery, kewenangannya berada di provinsi maupun pusat. Sejauh ini telah ada beberapa Kugar yang telah menerima program Pembinaan Usaha Garam (Pugar) berupa pemberian geo membran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



“Ya sudah ada beberapa kelompok yang telah diberi bantuan geo membran dari Kementerian Kelautan maupun provinsi. Dari kabupaten hanya pembinaan saja,” jelas Hery.

Meski begitu, Hery menilai, masih banyak para petambak yang justru lebih memilih instan dan tradisional.

“Padahal secara kualitas memakai geo membran akan lebih bagus meski waktunya memang agak lama. Hanya saja masih banyak petambak yang belum menggunakan itu,” paparnya.

Oleh karena itu, agar dapat mendorong penggunaan geo membran, DKP akan terus melakukan pembinaan. Selanjutnya, DKP akan fasilitasi kebutuhan petambak melalui Forum Group Discussion (FGD) terlebih dahulu. Terakhir, DKP juga berkeinginan memfasilitasi kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon.

“Misalnya apa saja sih kebutuhan mereka. Apakah alatnya?

Supaya bisa terserap ke industri. Itu lah kenapa harus kerjasama Disperindag supaya tembus ke industri. Karena kan Disperindag yang menentukan harga pasar garam,” jelas Hery.

Jika hal itu dapat terlaksana, Hery yakin, jika tahun depan kualitas NaCl garam Kabupaten Cirebon akan meningkat. Ia pun berjanji, akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk melihat situasi dan memunculkan ide.

“Kalau sekarang masih pembenahan, karena anggaran dari perubahan juga belum pengesahan. Kita ingin adakan bimtek bagi para petambak dengan mendatangkan narsum dari Disperindag maupun provinsi untuk sharing,” ujarnya.

Senada itu, Kasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan DKP Kabupaten Cirebon Yuliah Harwati juga mengaku telah memberikan pembinaan bagi para petambak garam. Sementara bantuan bagi para kelompok garam hanya baru didapatkan dari KKP.

“Pada tahun 2019, ada ban-

tuhan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebuah dua unit panel dan geo membran 16 gulung untuk tiga kelompok. Tapi dua tahun belakangan ini sedang vakum akibat pandemi covid,” kata Yuli.

KKP juga sempat memberikan program integrasi lahan. Tak kurang seluas 15 hektare lahan petambak garam di Kabupaten Cirebon akan dijadikan dalam satu manajemen. Tujuannya agar efisien dan hasil garamnya lebih bagus.

“Bagaimana pengolahannya, seperti apa air masuk, tanggul dan meja garamnya. Jadi petambak nanti tidak mengolah sendiri-sendiri. Tapi dibuatkan satu manajemen,” tambah Yuli.

Sementara untuk mengatur harga garam agar tak anjlok, Yuli juga sepakat akan bekerjasama dengan Disperindag Kabupaten Cirebon.

“Rencana program sudah ada di anggaran perubahan, tinggal pengesahan,” akunya.

Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Cirebon Dini Dinarsih, menyatakan setuju atas rencana DKP dan membuka lebar pintu kerjasama yang akan digarap.

Sejauh ini, Dini menerangkan, jika Disperindag juga sempat memfasilitasi *MoU* atau kerjasama antara petambak garam dengan pihak industri pada 2017 silam untuk penyerapan garam dari garam krosok menjadi industri konsumsi.

“Sudah pernah memfasilitasi petambak dengan industri di Kabupaten Cirebon, namun ditolak karena petambak ingin harganya lebih tinggi. Kalau kualitasnya bisa lebih baik, kita juga berkeinginan untuk memfasilitasi kembali agar diserap ke industri,” terang Dini. •Sar

Belajar dari Brebes

Miliki Washing Plant, Mutu Garam Makin Meningkatkan

Setelah mendapatkan bantuan alat pembersih garam dari KKP RI, produksi garam Brebes kian meningkat, bahkan mampu diserap industri dan dijual hingga luar provinsi. Bagaimana bisa?



Foto dok.jatengprov.go.id

Para petambak garam Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berbangga ria, setelah Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) telah membuahkan hasil melalui pembangunan *washing plant*. Yakni sebuah mesin pencucian dan pemurnian garam yang dikelola melalui koperasi.

Setidaknya, telah mampu memproduksi garam lokal yang berkualitas dan telah dijual hingga ke Provinsi Kalimantan. Keberhasilan itu pun terus berlanjut dengan dibuktikan diluncur-

kannya produk garam konsumsi lokal yang dilakukan oleh Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH bersama KKP RI di pabrik produksi garam Pesantunan pada Juni 2021 lalu.

“Alhamdulillah hari ini produk garam Kabupaten Brebes tembus ke level nasional, membuktikan bahwa kita juga mempunyai potensi di sektor pertambangan garam,” ucap Idza, seperti dikutip Portal Berita Pemprov Jateng. Produksi garam di Kabupaten Brebes, mampu mencapai 60 ribu ton per tahun dan dapat memenuhi kebutuhan garam di daerah maupun nasional. Jumlah itu didapat dari luas

lahan tambak garam di lima kecamatan yang semuanya dapat menghasilkan garam saat musim kemarau. Selain itu kadar Natrium Klorida (NaCl) garam pun telah mencapai 96 persen. Alhasil, garam Brebes telah menekan kontrak dengan berbagai industri. Diantara customer yang sudah kontrak dengan koperasi garam ialah PT Java Borneo Anugerah Nusantara (JBAN) yang menyerap sebanyak 49 ton dalam tiap bulan. Sementara garam yang telah di kirim ke Kalimantan sebanyak 24,5 ton (1 kontainer). Sedangkan untuk pemasaran garam di lokal, Pemkab Brebes mengaku sedang tahap



kontrak dengan KORPRI untuk penyaluran keseluruhan ASN yang diperkirakan akan dapat diserap 10 ton per bulannya.

Seperti diketahui, keberhasilan Pemkab Brebes dalam meningkatkan kualitas garam tidak terlepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) yang telah meresmikan *washing plant* atau alat pencuci dan pemurnian garam.

Peresmian dilakukan secara simbolik oleh Plt Dirjen PRL TB Haeru Rahayu bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet (Deputi Marinves Setkab)

Agustina Murbaningsih dan Wakil Bupati Brebes Narjo.

Peresmian alat pencuci dan pemurni garam tersebut, merupakan wujud perhatian Presiden Joko Widodo terhadap kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.

Washing plant adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam, yang terdiri dari bagian penggilingan/penghancur, pencucian, penirisan dan pengeringan, iodisasi, serta pengepakan.

Bahan baku yang digunakan adalah garam dengan SNI 4435 :2017 dengan kadar Natrium Klo-

rida (NaCl) atas dasar berat kering sebesar 85-94 persen dan menghasilkan output garam minimum sesuai SNI 3556:2016 dengan kadar Natrium Klorida (NaCl) minimal sebesar 94 persen.

Bantuan *washing plant* senilai Rp 2,7 miliar tersebut, diserahkan secara langsung oleh Plt Dirjen PRL TB Haeru Rahayu kepada Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera Brebes sebagai penerima bantuan.

Pembangunan *washing plant* bertujuan untuk meningkatkan kualitas garam rakyat guna memenuhi kebutuhan industri sehingga mampu menyerap produksi garam rakyat dan meningkatkan harga jual garam, serta membangun akses pasar garam berbasis ekonomi rakyat.

Pada tahun 2020, KKP melalui Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) memberikan bantuan *washing plant* di 7 lokasi, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pati, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pasuruan.

Hal itu sebagaimana arahan Presiden yang disandingkan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program nasional ini menunjukkan bentuk komitmen pemerintah untuk membuka lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat.

Sementara itu, perwakilan Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera Nahjo berkeyakinan, bantuan *washing plant* akan memberikan kesejahteraan yang layak bagi anggota koperasi.

"Saya yakin *washing plant* dapat memperbaiki kualitas garam kami, sehingga nantinya garam kami diterima oleh industri dan pasar," ucap Ponco.

Banggar Bahas Rancangan APBD 2022

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.



foto-foto : Qusey/dk

Hadiri Perayaan Ulang GenBI

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menghadiri undangan perayaan ulang tahun Generasi Baru Indonesia (GenBI) ke 10 di Gedung Bank Indonesia Cirebon. Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Bhakti Artanta.



Foto: foto - Qusoy/dk

Upayakan Capai Kembali UHC

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mendorong kenaikan capaian Universal Heart Coverage (UHC) di Kabupaten Cirebon yang saat ini tengah mengalami penurunan.



foto-foto : Quisoy/dk

Ikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan sosialisasi program pencegahan anti korupsi terintegrasi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



foto-foto : Qusoy/dk

Mohon Tertibkan Aktifitas Geng Motor



Assalamualaikum Wr.Wb
Kepada Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat. Perkenalkan saya Dzulkifli(24) asal Desa Winong

Kecamatan Gempol. Saya ingin menyampaikan kecemasan saya terkait aktifitas geng motor yang belakangan sedang menjadi buah bibir. Saya se-

dikit khawatir ketika kabar mengenai geng motor kembali diperbincangkan setelah sebelumnya, isu keamanan di Kabupaten Cirebon sudah cukup kondusif kini harus kembali terganggu.

Saya berharap, Bapak/Ibu anggota dewan dapat mengimbau pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian dari tingkat kabupaten maupun kecamatan agar dapat mengencangkan giat demi menjaga kondusifitas, dengan skala yang lebih masif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Cirebon dapat merasa lebih aman ketika sedang beraktifitas diluar rumah, terutama pada saat malam hari. Semoga masukan ini dapat didengar oleh para bapak/ibu dewan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
(Dzulkifli/Karyawan/Cirebon)

SDN 2 Cangkoak Butuh Perbaikan

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD. Saya Yuni (bukan nama sebenarnya) dari Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang. Sebagai salah satu wali murid SDN 2 Cangkoak, saya ingin DPRD ataupun Pemerintah Daerah melalui dinas atau lembaga yang berwenang agar dengan segera, merenovasi gedung SDN 2 Cangkoak yang ambruk akibat hujan deras yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Kejadian ini mengakibatkan sebagian siswa/siswi terpaksa harus belajar di dalam tenda darurat. Menurut saya langkah untuk merenovasi gedung sekolah ini perlu dilakukan secepatnya, agar Kegiat-



tan Belajar Mengajar (KBM) dapat kembali dilakukan di dalam ruang kelas. Terimakasih..

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
(Yuni/Ibu Rumah Tangga/Cirebon)

Saran Awasi Jasa Penyaluran TKI

Assalamualaikum Wr Wb
Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati. Saya Nono, anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Cirebon. Saya ingin memberi masukan kepada pemerintah daerah, mengenai sistem penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Saya berpendapat, Kabupaten Cirebon perlu menginventarisasi semua jasa penyalur TKI yang berada di Cirebon, demi mengurangi risiko pemberangkatan TKI secara tidak resmi (ilegal). Saya juga menghimbau pemerintah agar tidak segan-segan, menindak para agen penyalur tenaga kerja ilegal yang kedapatan masih beroperasi.

Masih segar diingatan kita kasus Ibu Wayem, warga Desa Pabelan, yang dijebak dan diperlakukan oleh agen yang memberangkat-



kannya ke negara Irak. Saya harap, kasus Ibu Wayem ini menjadi yang terakhir. Betapa pentingnya jasa pemberangkatan TKI yang legal.

Mudah-mudahan masukan ini dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti.

Wassalamualaikum Wr Wb
(Nono/SBMI/Cirebon)

Lampu Lalin Talun Sering Padam



Salam hormat Bapak/Ibu DPRD Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Indra, dari Desa Wanasaba Kecamatan Talun. Saya ingin menyampaikan keluhan, mengenai

kondisi unit lampu lalu lintas yang berada di jalan Pangeran Cakrabuana tepatnya di perempatan Moun-toya Talun. Dimana seringkali padam dan menimbulkan lalu-lintas

menjadi tidak teratur (semrawut).

Padamnya lampu lalu-lintas ini, sering terjadi pada saat pagi hari, ketika warga hendak berpergian. Bahkan terkadang pada sore hari, tepat jam pulang kerja. Seperti diketahui, volume kendaraan roda dua atau roda empat yang melintas di jalan ini begitu ramai.

Apalagi di jam tertentu, arus kendaraan yang melintas begitu sangat padat. Sehingga saya berharap, unit lampu lalu lintas yang berada di sepanjang Pangeran Cakrabuana mohon untuk dicek dan segera diperbaiki agar tak mengganggu kelancaran lalu-lintas lagi. Terimakasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

(Indra/Mahasiswa/Cirebon)

Neng Alena Empon-Empon Resep dari Youtube Kini Tembus Minimarket

Sebelum tembus dan terjual di berbagai minimarket, minuman herbal bernama Empon-Empon ini, berbahan resep eksperimen dan pengetahuan dari youtube. Bagaimana bisa?



Jika kebanyakan para pedagang dan sektor UMKM mengalami penurunan omzet saat pandemi mulai merangsek dan menyerang tatanan kehidupan bangsa. Berbeda halnya dengan produk minuman herbal Neng Alena Empon-Empon satu ini, yang justru laris manis diserbu pembeli.

Pemiliknya yakni Nur Atikah, perempuan asli Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Berbahan dasar rempah hasil eksperimen sendiri ditambah pengetahuannya melalui *youtube*, Atikah menciptakan Neng Alena Empon-Empon yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Ketika Covid-19 mulai menjadi ancaman besar kesehatan setiap orang, Empon-Empon justru menjadi minuman herbal yang diakui baik bagi peningkatan imun karena terbuat dari bahan dasar rempah jahe.

Saat baru merintis, Atikah mengeluarkan modal sekira Rp 500 ribu dari kantongnya. Meski tak banyak, ia tak ambil pusing. Uang itu ia belanjakan bahan-bahan jahe 5 kilo dan peralatan lainnya. Hasil-

ya ia membuat 10 botol Empon-Empon.

Atikah pun mulai memasarkan produk itu melalui media sosial Instagram. Tak butuh waktu lama Empon-Empon itu disambut baik para pengikutnya dan langsung ludes terjual. Perempuan berusia 31 tahun pun begitu riang, meski harus memutar otak kembali agar dapat memproduksi lebih banyak serta membuat kemasan baru.

"Akhirnya waktu itu saya mulai beranjak dari kemasan botol beralih membuat kemasan serbuk. Karena yang serbuk bisa bertahan selama setahun. Itu sudah diuji di laboratorium Bandung," katanya meyakinkan.

Tak hanya membuat kemasan baru, Atikah mencoba meningkatkan produk Empon-Empon miliknya semenarik mungkin. Terutama agar dinikmati kaum *millennial* dengan menyediakan varian rasa yang beragam.

"Ya saya buat banyak rasa, seperti coklat jahe, susu jahe *green tea*, susu jahe kopi. Bahkan saya



membuat khusus untuk meningkatkan imun yang menggunakan jahe kering,” jelasnya.

Selain pandai mengulik sesuatu dan lihai membaca peluang, Atikah juga cergas mengolah bisnisnya. Jika awalnya ia belanja jahe di Pasar Jagasatru, Atika mulai membeli langsung ke petani jahe agar lebih menghemat.

“Saya cari di internet dimana saja daerah yang memiliki kelompok petani jahe. Saya pun memutuskan untuk belanja jahe di Tasikmalaya, Ciamis, Bandung bahkan Medan karena kualitas yang baik dan harganya yang ramah di kantong,” ungkapnya.

Setelah terus memproduksi

dan memasarkan melalui digital, minuman jahe Neng Alena Empon-Empon pun berkembang begitu pesat. Ia bahkan telah memiliki dua karyawan, dan telah memproduksi 1000 pcs untuk 25 toko yang menjadi langganan.

Seiring waktu, Atikah mulai merambah produknya di mini market seperti di Yogya, Asia dan Surya. Selain itu, produknya kini sudah diminat beberapa kota lain seperti di Depok, Bekasi, Jakarta hingga Bogor.

Lakunya produk Empon-Empon tak terlepas dari selektifnya Atikah dalam memilih bahan baku jahe yang berbeda dengan produk jahe lainnya.

Neng Alena Empon-Empon dibuat dari jahe yang berumur 10 bulan. Alasannya, kata Atikah, jika jahe yang berumur memiliki rasa pedas dan rasa hangat yang terasa. Sementara jahe muda tak begitu karena cepat layu.

Untuk satu buah minuman Empon-Empon rasa jahe merah berukuran 200 gram dihargai hanya Rp 25 ribu, sementara rasa jahe *green tea* dihargai Rp 20 ribu dengan ukuran 100 gram.

Usaha keras Atikah selama membangun Neng Alena Empon-Empon kini sudah terjawab. Sekarang produknya sudah dapat dikenal seluruh masyarakat. Omzetnya bahkan telah mencapai Rp 25 juta dalam sebulannya.

Bahkan di masa pandemi ini, Atikah sempat menerima pesanan dari Bank Indonesia (BI) yang memesan produk Neng Alena Empon-Empon sejumlah 3000 pcs untuk bansos terdampak covid-19.

“Karena saat itu BI mempunyai program penyaluran bansos dan mengharuskan isi bansos berasal dari produk UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon,” terang Atikah.

Pimpinan BI yang telah memesan produk Atikah pun begitu merespon baik. Bahkan mereka mendorong agar Atikah mulai menggunakan mesin untuk memproduksi Neng Alena Empon-Empon.

“Memang seharusnya di tahap ini saya sudah harus pakai mesin. Kalau sekarang masih manual dan itu memakan waktu selama dua jam. Mesin harganya sekira Rp 15 juta. Untuk sekarang memang belum kepikiran. Yang sedang saya pikirkan saat ini target kami bisa ekspor sambil menunggu syarat legalitas produk kita miliki,” pungkas Atikah. •lan

Melawan Ombak dan Maut

Tak kurang dari 17.965 warga Kabupaten Cirebon bergantung hidupnya melaut. Bermatapencaharian menjadi nelayan. Pemandangan itu dapat ditemukan dari wilayah Kapetakan hingga Losari.

Dalam setiap hari, tampak terlihat aktivitas mereka. Puluhan perahu ukuran di bawah 5 GT bersandar di tepi-an sungai kecil. Sebagian tengah memperbaiki jaring, menyiapkan perahu kayu. Ada pula yang tengah bercanda gurau di balai bambu persis samping dermaga.

Mereka adalah para pengadu nasib laut. Waktu petang adalah waktu berangkat. Seringkali mereka harus melawan buruknya cuaca hingga angin kencang yang begitu membahayakan keselamatan mereka. Tak sedikit kejadian perahu terbalik dan kisah nelayan yang terombang-ambing. Sementara hasil yang diperoleh juga tak menentu meski nyawa taruhannya. •Soy

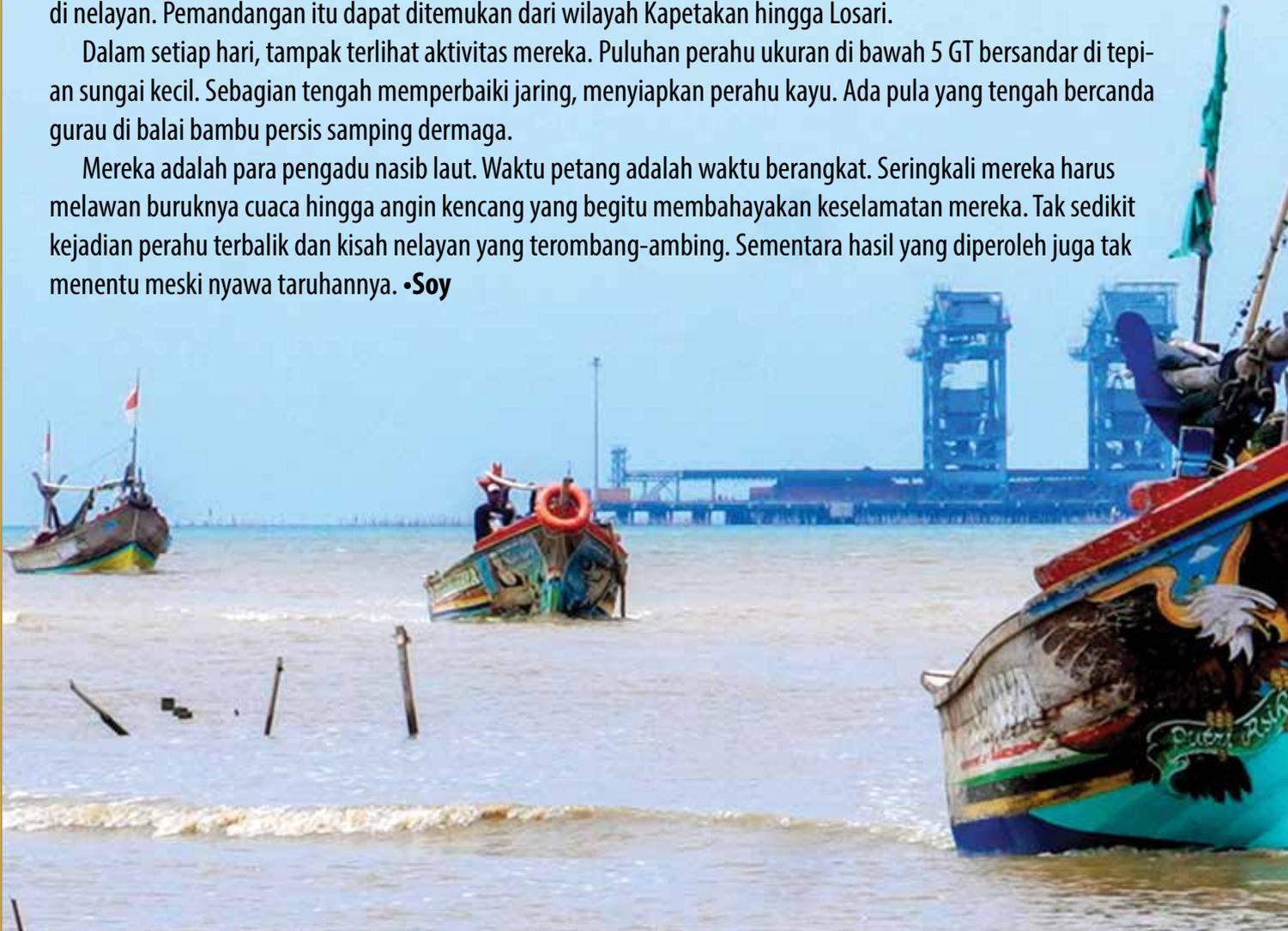


foto-foto : Qusey/dk





Hasan Basori

Sempat Profesi Konsultan Hingga Pengusaha Sawit

Sebelum menjadi legislator, Hasan sempat menjadi konsultan di beberapa perusahaan dan mengurus usaha sawit milik keluarganya di Riau. Bagaimana kisahnya?

Menjadi legislator bagi laki-laki yang berawakan tegap asli Kecamatan Greged ini memiliki dua fungsi. Pertama fungsi struktur sebagaimana regulasi dan undang-undang. Kedua fungsi kultur untuk mendukung struktur sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat.

Ia adalah Hasan Basori, anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnyanya kedua fungsi itu sangat berkelindan, bahkan tak akan optimal jika hanya mengandalkan salah satunya.

“Misalnya menjadi sosial *fighter*, mencari tahu masalah-masalah yang ada di dapil itu dibutuhkan fungsi kultur. Itu penting bagi seorang legislator,” ucap Hasan.

Hasan adalah pendatang baru di kancah politik Kabupaten Cirebon. Menjadi wakil rakyat baginya justru hal yang tak pernah diimpikan. Masa mudanya ia habiskan di Provinsi Riau menjadi konsultan dan mengurus usaha sawit. Ia pun tak pernah memiliki ketertarikan dengan dunia politik.

Tahun 2014, saat masa pemilu dan pileg, Hasan diminta orang terdekatnya untuk pulang ke Cirebon dan diminta mencalonkan diri. Hasan sempat bimbang dan menolak. Ia pun menanggukannya dengan berjanji akan maju di Pileg yang akan datang.

“Bisa dibilang saya kejebak. Awalnya untuk menenangkan orang dekat saya, yang meminta saya nyalon beberapa kali. Saya bilang nanti saja tahun 2019. Akhirnya Pileg 2019 saya ditagih dan karena enggak enak saya katakan iya. Meski tak serius dan

prioritas. Dan akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon dapil 7," kenangnya menceritakan.

Meski begitu, pilihan menjadi wakil rakyat telah merubah gaya dan pola pikir yang jauh dari kehidupannya selama di Riau. Jika dulu menjadi *entrepreneur* Hasan terbiasa bebas. Saat ini ia harus mendedikasikan diri dengan masyarakat, hingga lahirah pemikiran menurut Hasan, jika politik itu ekuivalen dengan sosial.

"Ekuivalen itu artinya hampir sama. Saya kan digaji dan mendapat fasilitas publik, berarti saya harus fokus pada sosial, itu pemikiran ekstrem saya," tuturnya.

Ketika telah terpilih, Hasan telah bertekad untuk fokus memikirkan mengenai kemasyarakatan, pembangunan dan sosial. Oleh karena itu, Hasan telah rela meninggalkan kesibukannya di Riau dan mengundurkan diri dari beberapa perusahaan *terdaftar*.

Tujuannya, agar ia bisa menjalankan fungsi kultur legislatif dengan maksimal. Seperti menghadiri kegiatan kebudayaan maupun berbagai acara adat masyarakat.

Hasan juga bertekad dapat memfasilitasi pemahaman pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pemerintah. Sebab, jika masyarakat paham kebijakan, maka mereka akan ikut andil dalam proses pembangunan.

"Yang akhirnya masyarakat pun akan semakin paham tugas-tugas eksekutif dan legislatif. Karena mereka juga pelaku pembangunan yang mesti dilibatkan kehadirannya," kata Hasan.

Sejauh ini, Hasan memiliki dua program pribadi. Program pertama bernama Saung Asmara Hati (aspirasi masyarakat harapan dan tempat inovasi). Di rumah orangtuanya di Grege, Hasan membangun saung yang ia desain langsung sebagai tempat bertemu langsung dengan masyarakat. Tiap Minggu, Hasan tak pernah absen berada di saung.

"Yang mau janji, ketemu ngopi dan ngobrol, saya sediakan saung yang terbuat dari bambu di atas balong ikan. Saya menempatkan diri menjadi konsultan masyarakat," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon itu.

Selain memiliki saung aspirasi, Hasan memiliki program unik lainnya, bernama survei kampung sendiri (SKS). Program ini diinisiasi guna mengajak masyarakat atau perangkat desa mengeksplorasi potensi yang berada di desa.

Sebelum mengeksplorasi, Hasan akan terlebih dahulu melakukan kajian dengan metode *brain-*



storming. Tujuannya untuk memetakan potensi, strategi sebelum terjun ke lapangan dan mengawalnya ke Pemda.

Menjadi politisi, bagi Hasan, ada tiga kalimat bahasa Turki yang dapat menjadi kesimpulan. Pertama *Hizmet* atau khidmah, yang bermakna melayani masyarakat. Kedua, *sohbet* yang berarti berbincang dan silaturahmi. Terakhir *himmət*, yang memiliki arti pengorbanan. Artinya pengorbanan waktu pikiran materi dan tenaga.

"Ketiga itu menjadi kesimpulan saya dalam memahami politik. Karena menjadi wakil rakyat tentu akan terjadi perbincangan dengan masyarakat karena adanya pertemuan dengan tujuan melayani. Dan tentu membutuhkan pengorbanan," pungkas Hasan. •Sar

Yayat Hidayat Dikenal Pemalu dan Dermawan

Masih terlalu kecil saat Yayat ditinggal ibunya. Dewasa kini ia dikenal dengan sosok pemalu dan ringan tangan kepada sesama .



Jika hidup ibarat arena pertandingan, tentu sangat diperlukan strategi untuk menghadapinya. Itu lah prinsip yang masih dipegang lelaki bertubuh tegap hingga kini. Ia adalah Yayat Hidayat, lelaki asal Desa Greged, Kecamatan Greged.

Sosok laki-laki ini penuh kerendahan hati nan lapang saat caranya memperlakukan seseorang. Pun dengan tutur katanya yang lembut. Membuat nyaman siapapun saat duduk berbincang.

Maklum, sikap itu tumbuh tidak lepas dari peran didikan orangtuanya dahulu terutama ibunya. Sedari kecil Yayat selalu diajarkan untuk selalu

menghargai sesuatu meski sekecil apapun. Maka, tak perlu aneh jika sikap sumeleh begitu nampak dalam dirinya.

Terlebih ia pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Yayat kehilangan sosok ibu sebelum ia beranjak dewasa.

“Saya sudah ditinggal ibu sejak duduk di bangku kelas 2 SD. Saya benar-benar merasa kehilangan sosok panutan sekaligus cahaya kehidupan bagi saya,” ucapnya mengenang.

Kehilangan ibu, begitu menyedihkan bagi Yayat. Memaksanya melakukan sesuatu yang sebenarnya



jauh dari watak aslinya.

“Ya saya mulai nakal. Yang paling membekas saat SMA, sering banget bolos sekolah. Tapi saya sangat menyesalinya, tidak seharusnya saya seperti itu, tapi ya namanya juga anak remaja. Apalagi tak ada lagi yang menasehati saya,” tuturnya menceritakan.

Setamat lulus dari sekolah menengah, pria kelahiran Cirebon 1973 itu, mulai sadar jika ia harus mengubah hidupnya agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Ia mulai berbenah dan membangun kehidupan barunya dengan ikut merantau bersama saudaranya di Jakarta.

Di Ibu Kota itu, Yayat pun menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teknologi Saptata Taruna mengambil jurusan teknik sipil. Namun, saat menjadi mahasiswa ia tak banyak merengkuh pengalaman dengan bergabung di organisasi apapun sebagaimana sebayanya. Meski begitu ia menyesali karena akhirnya ia pun tak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

“Saya jadi pemalu, dulu saat kuliah saya jarang sekali bergaul. Makanya saya jarang muncul di

publik hingga sekarang karena takut salah. Saya lebih suka bergerak di bawah saja,” ungkapnya.

Singkat cerita, empat tahun telah berlalu. Yayat pun lulus kuliah. Selanjutnya ia bekerja menjadi seorang konsultan bidang kelautan meski hanya beberapa tahun lamanya.

Menahun hidup di Jakarta, menapaki kejenuhannya. Yayat berpikir tak elok jika hanya berkembang di kota orang. Ia pun memutuskan untuk pulang ke Cirebon dengan harapan akan lebih bermanfaat di desa asalnya.

Benar saja, sekembalinya di Cirebon, Yayat seringkali dimintakan bantuan. Suatu hari, ia mendapati warga yang sedang membutuhkan pertolongan karena sakit parah. Dengan tulus, ia pun membantu dengan membiayai perawatannya hingga sembuh.

Semenjak itu, Yayat pun mulai aktif dalam kegiatan sosial yang digelar masyarakat sekitar. Tak hanya hadir saja, Yayat ikut serta berpartisipasi menyukseskan kegiatan, baik melalui finansial maupun tenaga. Seiring waktu, para warga pun mengenal Yayat orang yang penuh

ringan tangan.

Bagi Yayat, apa yang telah dilakukannya memang sudah menjadi tugas seorang manusia. Saat itu pula banyak ajakan yang datang pada dirinya untuk terjun dalam dunia politik. Awalnya ia merasa gamang karena tak familiar. Namun setelah beberapa kali didorong keluarga, akhirnya Yayat pun memutuskan terjun dan melabuhkan diri dengan bergabung di Partai Golkar.

Pada Pemilu 2019 lalu, Yayat pun terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Namun tak banyak berubah dari sikap budimannya. Ia tetap melakukan kegiatan amal yang jauh dari sorotan publik.

“Karena kalau saya malu. Ngasihnya enggak seberapa. Jadi biarkan masyarakat saja yang menilai,” terangnya.

Hingga kini, Yayat mengakui jika ia masih belajar menjadi wakil rakyat yang baik. Karena belum terbiasa berada di lingkungan politik, ia terus berusaha agar dapat beradaptasi mengikuti alur yang ada.

Ia sempat beranggapan jika dalam dunia politik itu tidak jauh dengan sifat ria atau pamer kebaikan. Namun perlahan anggapan itu mendapatkan titik terang. Menurutnya seorang wakil rakyat pada akhirnya dituntut pembuktian oleh masyarakat. Meski begitu Yayat tetap menjadi pribadi pemalu dan jarang tersorot media.

Alasannya, karena ia tak memiliki pengalaman apa-apa sehingga justru membuatnya kaget. Baginya sekarang, ia harus menjadi legislator yang bertanggungjawab hingga akhir jabatannya.

“Sampe sekarang saya masih belajar berpolitik, tetapi berpolitik yang santun,” pungkasnya. •lan

Komisi I Kaji Pengelolaan Informasi Publik

Komisi I sambangi Pemkab Karawang setelah dirasa berhasil menyelesaikan 70 persen sengketa informasi publik melalui aplikasi. Bagaimana caranya?



Penyelenggaraan sistem pengaduan sengketa informasi publik Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon dirasa belum optimal. Pasalnya, secara persentase, KID baru mampu menindaklanjuti 10 persen dari seluruh aduan yang masuk selama 2021. Hal itu disebabkan KID mengalami berbagai kendala sistem dalam menyaring informasi untuk dipublikasi.

“Kita melihat sistem KID milik kita itu kurang optimal sarana prasarananya. Jumlah 300 pengaduan tahun ini hanya beberapa yang ditindaklanjuti,” jelas Junaedi, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Sementara selama 2020, Diskominfo dan KID Kabupaten Cirebon hanya menangani delapan sengketa informasi. Kedelapan sengketa informasi tersebut, pemohon paling banyak mengenai permintaan transparansi anggaran penyelenggaraan pemerintah daerah

Sehingga Junaedi berpendapat, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon harus cepat berbenah menyediakan sarana dan prasarana aduan publik yang lebih baik.

“Misalnya, pastikan semua OPD memiliki Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang detail tentang keterbukaan infor-

masi, sarana yang memadai dan informasi publik yang terus *update*,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Junaedi, perlunya pelatihan dan fasilitas bagi komisioner KID pun menjadi penting sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, sebagai perbandingan, Oktober lalu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menyambangi Kabupaten Karawang. Kunjungan yang bertujuan mengetahui sistem pelayanan aduan dan peran pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pun diterima langsung pimpinan DPRD Kabupaten Karawang serta Diskominfo Ka-



bupaten Karawang.

Diskominfo Kabupaten Karawang menyampaikan, jika mereka tak membentuk KID sebagaimana Kabupaten Cirebon, melainkan hanya memiliki PPID. Namun, dari aduan yang masuk melalui PPID setidaknya telah menyelesaikan 77,8 persen dari total aduan, atau 360 dari 464 laporan. Sementara sisanya dalam tahap penggodokan di instansi.

Seperti diketahui, penanganan aduan di Kabupaten Karawang memiliki payung hukum Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Infor-

masi Hukum.

Berlandaskan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah meluncurkan sistem aplikasi penampung aduan dari masyarakat bernama 'Tangkar' atau Tanggap Karawang sejak Februari 2019 lalu. Alhasil melalui Tangkar, respon terhadap aduan masyarakat di Kabupaten Karawang semakin cepat.

Aplikasi Tangkar memiliki puluhan admin, yang berada di berbagai organisasi perangkat daerah, BUMN dan BUMD. Ada pula admin dari instansi pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Polres Karawang, BPN,

hingga Samsat.

Selain dapat mengakses aplikasi langsung, warga juga dapat mengadakan melalui seluruh laman media sosial. Dari aduan yang masuk melalui media sosial, aplikasi Tangkar akan merangkum dan mendata sekaligus mendeteksi. Aplikasi tersebut juga terhubung langsung oleh Pimpinan Daerah dan dapat dimonitor.

Setelah mendata, Tangkar akan memilah dan mengarahkan aduan dan laporan melalui instansi yang berkaitan untuk ditindaklanjuti dengan tenggat waktu 10 hari.

Selain itu, Perda Nomor 14 Tahun 2017 milik Pemkab Karawang juga mengatur pemilihan pengecualian informasi untuk yang tertuang pada pasal 17 huruf a sampai c.

Meskipun sampai saat ini, Pemkab Karawang belum menerbitkan surat keputusan untuk menentukan informasi yang perlu dan tidak perlu dipublikasi. Sedangkan untuk informasi yang layak publikasi harus memenuhi syarat seperti, dokumen tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disetujui DPRD pada Paripurna.

"Jika belum ada audit maka tetap harus menunggu hasil audit terlebih dahulu, baru bisa di publikasi," jelas perwakilan Diskominfo Kabupaten Karawang saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya peran PPID ini, Pemkab Karawang mengaku telah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus menekankan kembali komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi publik sebagai salah satu fondasi utama mewujudkan *good governance*. •Soy

Komisi II Janji Usut Pembenahan Parkir Gunung Jati

Pemdes Astana keluhkan desa tak lagi peroleh PAD dari lahan parkir Sunan Gunung Jati, setelah Disbudparpora berhenti mengelola. Komisi II janji usut pertanggungjawaban pemda.



Lahan parkir Komplek Makam Sunan Gunung Jati yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunungjati, pada 2016 sempat dikelola oleh Disbudparpora Kabupaten Cirebon. Mereka menyewa lahan tersebut dari Korem 063 Sunan Gunungjati dengan biaya Rp 90 juta per tahun.

Namun hal itu tak berlangsung lama, tepatnya pada 2018, Disbudparpora memutuskan untuk berhenti menyewa lahan, lantaran harga sewa telah naik menjadi Rp 230 juta per tahun. Akibatnya Pemdes Astana yang semula mendapatkan PAD hasil

pembagian pengelolaan parkir dari Disbudparpora pun tak lagi memperoleh.

Pemdes Astana mengaku, pengelolaan parkir adalah satu-satunya pendapatan tambahan untuk desa. Karena selama ini, Desa Astana tak memiliki aset Desa yang lain.

“Dengan berhentinya pengelolaan lahan parkir kita tak lagi punya PAD. Apalagi bengkok juga enggak ada. Saya merasa kasihan kepada perangkat desa yang tak lagi memperoleh penghasilan lain,” ungkap Nuril Anwar, Kuwu Desa Astana.

Ia pun menyampaikan, per-

soalan aset desa yang hingga kini masih belum menemui titik terang.

“Saya akan memulainya dengan parkir, untuk parkir sendiri pada 2016 hingga 2017 itu masih dikelola oleh Disbudparpora. Kami juga turut gabung dalam mengelola itu. Namun di tahun 2018 parkir tersebut dikembalikan ke Korem SGJ 063,” tutur Nuril.

Nuril menyayangkan, alasan Disbudparpora yang berhenti mengelola lahan parkir karena alasan kenaikan sewa lahan. Pasalnya secara perhitungan telah sesuai sebagaimana Nilai Jual



Objek Pajak (NJOP) yang mengharuskan 0,03 persen atau Rp 240 ribu per meter.

“Jadi kalau dikalihkan lahan 3 hektare milik Korem 063 SGJ, jumlah total sewanya memang Rp 230 juta,” ungkapnya.

Nuril berpendapat, alasan lain Disbudparpora memilih berhenti mengelola parkir, disebabkan karena capaian PAD lahan parkir tak sesuai target. Padahal jika dilihat dari perhitungan Pemdes Astana, Nuril meyakini hasil yang diperoleh seharusnya dapat melebihi target capaian.

“Tahun 2017 Disbudparpora menargetkan PAD Rp 160 juta, tetapi tidak mencapai target. Padahal dalam hitungan kami, seharusnya hasil yang diperoleh Rp 180 juta. Makanya kami juga

heran bagaimana perhitungan Disbudparpora itu,” jelasnya.

Apalagi jika dilihat dari rincian harga tiket masuk sejumlah Rp 72.500 untuk bus, sebagaimana kesepakatan Disbudparpora dengan Pemdes Astana, lanjut Nuril, seharusnya sudah dipastikan melebihi target.

Pada tahun 2019, Nuril pun mencoba berkomunikasi kembali dengan Kepala Disbudparpora Kabupaten Cirebon untuk meminta hak desa. Pasalnya ia sudah mulai resah setelah setahun Pemdes Astana absen dari PAD.

“Saat itu kepala dinasnya Pak Hartono namanya. Saya minta hak desa dan dijawab katanya sudah disiapkan. Akhirnya saya hanya mengiyakan saja waktu itu. Saya tidak mau mengorek

hal itu lagi,” kata Nuril.

Nuril begitu berharap, potensi lahan parkir Situs Sunan Gunung Jati bisa kembali mendatangkan PAD bagi desa. Meskipun ia juga mengakui, jika ia tak memiliki wewenang karena lahan parkir tersebut bukan milik desa.

Menanggapi itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Desa Astana, guna membahas aset desa pada Oktober 2021 lalu.

Ketua Komisi II Mad Saleh pun turut berpendapat kepada seluruh audien setelah mendengar semua pemaparan Nuril, ia menyampaikan kalau persoalan mengenai parkir itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Yang saya tahu, parkir itu sangat signifikan dalam mendorong PAD. Maka dengan adanya kunjungan ini mudah-mudahan kami dapat menindaklanjuti secara serius,” kata Saleh.

Saleh menilai, jika persoalan aset memang harus diusut secara tuntas karena sudah melanggar Undang-Undang yang berlaku. Mad Saleh juga menegaskan, kepada Kuwu Desa Astana Nuril agar tidak hanya berdiam. Pasalnya kuwu merupakan panjang tangan dari Pemkab Cirebon.

Oleh karena itu, Saleh pun berencana akan menindaklanjutinya ke Pemda Kabupaten Cirebon agar Pemdes Astana bisa dapat kembali mendapatkan PAD.

“Pemda jangan seolah-olah mata mereka tidak melihat, telinga tidak mendengar. Ini kepentingan untuk Kabupaten Cirebon agar lebih baik, kepentingan Kabupaten Cirebon adalah kepentingan rakyat. Sekali lagi saya tegaskan kepada seluruh yang terlibat dalam proses ini agar mengusut siapa pelaku di balik ini semua,” tegas Saleh, menutup kunjungan. •Lan

Komisi III Tinjau Perbaikan Jalan Paburan-Ciledug

Dinas PUPR tengah merealisasikan perbaikan jalan penghubung Paburan-Ciledug, Komisi III kembali tinjau progres pekerjaan.



Kerusakan jalan penghubung Paburan-Ciledug sudah dikeluhkan warga sejak setahun lalu. Bahkan persoalan tersebut sampai ramai dibahas di media sosial. Pada Februari 2021 lalu misalnya, entah siapa yang membuatnya, para warganet memunculkan kreativitas untuk membuat mim sarkas sebagai bentuk kritik atas kondisi jalan.

Seperti yang dilakukan oleh pengguna akun *facebook* bernama Kang Ato. Ia mengunggah meme bertuliskan Wisata Anyar Lobang Sewu bertempat di Jalan Paburan-Ciledug depan Pasar Sayur Pabuaran. Dibuka setiap hari. Gratis 24 jam selama 7 hari.

Para warga sudah lama berharap, pemerintah daerah bisa memperbaiki secepatnya karena jalur tersebut begitu sentral sebagai mobilitas warga.

DPRD Kabupaten Cirebon pun telah lama mendapat laporan masyarakat mengenai kondisi jalan lubang sewu tersebut. Tahun lalu, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas PUPR Kabupaten Cirebon telah mengecek di lapangan.

“Saat itu kondisi jalan rusak parah. Banyak genangan air kerena jalan berlubang sehingga sangat mengganggu aktifitas warga,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Her-

manto, saat sidak 2020 lalu.

Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan akhirnya juga sempat meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama melintasi jalan rusak itu.

Namun demikian, Tomy mengaku, bukan berarti Dinas PUPR tidak serius untuk memperbaiki. Tomy menjelaskan, adanya *refocusing* anggaran sebesar 86 persen pada 2020 lalu telah memaksa kondisi jalan rusak belum semuanya dapat diperbaiki.

“Kita berkomitmen membangun Kabupaten Cirebon. Namun bukan berarti besok di-



kunjungi, besok masuk dalam pemberitaan, dan besoknya lagi langsung dieksekusi. Ada aturan-aturan yang harus ditempuh dulu. Dari sisi perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan,” jelas Tomy.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki juga pernah berjanji jika salah satu program prioritas Dinas PUPR tahun 2021 yakni perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan. Ia berencana akan mengaspal semua jalan yang telah rusak. Meskipun secara prioritas, akan dialokasikan untuk jalan yang lebih dulu rusak pa-

rah. Seperti Jalan Pabuaran-Ciledug dan Astanajapura, Karang Sembung.

Janji itu pun nampak terlunasi mulai Agustus 2021 silam, jalan yang rusak di depan pasar sayur Pabuaran sedang diperbaiki menggunakan betonisasi. Proyek itu pun tak luput dari pemantauan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.

Tepat pada Oktober 2021 kemarin, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas PUPR Kabupaten Cirebon pun kembali mengunjungi lokasi perbaikan jalan Pabuaran.

Dalam kesempatan tersebut,

Tomy menjelaskan, perbaikan jalan ini menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 1,1 miliar dengan tenggat waktu 150 hari dan 180 hari masa pemeliharaan.

“Ruas jalan yang ditingkatkan sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter. Detailnya bahu jalan kanan dan kiri 0,7 meter. Sebagai pemegang proyek tersebut digarap oleh CV Construction Jawa Barat,” jelas Tomy.

Adapun, Lanjut Tomy, uraian pekerjaan perbaikan itu terdiri dari tiga divisi. Pertama, Divisi 5 Perkerasan Berbutir dengan 4 lapisan: lapis pondasi agregat kelas b untuk profilering, lapis pondasi agregat kelas b tebal 34 cm untuk opritan jalan masuk, perkerasan beton semen dengan OPC tipe satu dan *fly ash* serta lapis pondasi bawah beton kurus dengan tebal 7 cm.

Kedua, Divisi Perkerasan Aspal yang terdiri dari: lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, lapis perekat aspal cair dan lapis tipis aspal beton. Terakhir, Divisi Struktur, yang berkaitan dengan beton struktur dan beton untuk bahu jalan.

Melihat itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto begitu mengapresiasi kinerja perbaikan jalan tersebut. Hanya saja, ia menyayangkan tidak adanya pekerjaan pembuatan saluran drainase pada ruas jalan tersebut.

Pasalnya, ia mengkhawatirkan ketika musim hujan dengan curah hujan tinggi tiba, genangan air akan berada di kanan kiri jalan yang dapat menggenangi pertokoan warga. Karena itu, Hermanto menyarankan agar Dinas PUPR bisa merencanakan pembuatan saluran drainase di ruas jalan Pabuaran- Ciledug juga. •Muiz

Pansus I Studi Banding Penanganan Pandemi

Pemprov DKI Jakarta dinilai berhasil tekan zero kasus pandemi setelah mereka mengesahkan Perda tentang Penanganan Covid-19 pada 2020 lalu.



Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan studi banding dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Khususnya dalam penanganan pandemi Covid 19 sebagai bahan kajian penerapan kebijakan di Kabupaten Cirebon dalam menurunkan dan menekan laju pagebluk.

Rombongan Pansus I pun diterima langsung Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Melalui anggotanya Wibi Andriano, ia pun melaporkan penanganan Covid 19 sejak zona merah hingga kondisi saat ini yang berubah klaster zona hijau.

"Awal tahun 2020, kami sempat mengalami fase pandemi yang begitu berat. Tepatnya ketika Dinkes Provinsi Jakarta mengeluarkan surat edaran

tentang kewaspadaan dari *coronavirus*, pemprov pun langsung melakukan siaran pers dan membentuk tim tanggap Covid 19," papar Wibi.

Wibi melanjutkan, tak berselang lama Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anis Baswedan mengumumkan sebanyak 115 warga terpapar Covid. Berbagai upaya pencegahan pun langsung diberlakukan. Mulai dari penerapan protokol kesehatan, menutup sementara layanan perizinan, pembatasan kegiatan hingga meluncurkan situs resmi informasi terkini mengenai pandemi.

"Namun hal itu tak berjalan mulus, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mengundang banyak polemik di tengah masyarakat. Bahkan hampir terjadi demonstrasi besar-besaran oleh pedagang

kios Tanah Abang," ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jakarta tak tinggal diam. Setelah melalui diskusi panjang, mereka menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid di akhir 2020. Alhasil polemik penanganan pandemi dapat terkontrol dengan baik.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon Mahmudi pun mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jakarta. Menurutnya hal itu bisa dijadikan percontohan untuk Kabupaten Cirebon.

"Ini bisa menjadi acuan untuk mendesak eksekutif di Kabupaten Cirebon agar segera membuat beberapa Perbup mengenai Covid. Sehingga, nantinya tak ada lagi kebijakan yang serba mendadak," jelas Mahmudi.



Namun Mahmudi pun menanyakan kebijakan anggaran *refocusing* di DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2022 nanti. Pasalnya Mahmudi menceritakan jika Kabupaten Cirebon pada 2020, telah merelokasi senilai Rp 136 miliar untuk penanganan pandemi. Begitu pun pada tahun yang berjalan.

“Meski sekarang Covid 19 dinyatakan landai, tetapi juga kita masih mengkhawatirkan jika tiba-tiba terjadi lonjakan kasus seperti sebelumnya. Apakah Pemprov DKI tetap menyiapkan anggaran penanganan Covid kembali untuk tahun depan?” tanya Mahmudi.

Sementara itu, Koordinator Pansus I Teguh Rusiana Merdeka mempertanyakan peran DPRD Provinsi Jakarta dalam menyusun Perda tentang Penanganan

Covid-19. Pasalnya di Kabupaten Cirebon hanya mengandalkan Perda tentang Ketertiban Umum.

“Apakah DPRD Provinsi DKI Jakarta pernah membuat pansus tentang penanganan Covid juga? Seperti apa rekomendasi yang disuarakan kepada Pemprov?” tanya Teguh.

Menjawab itu, Wibi menerangkan jika anggaran penanganan Covid di DKI Jakarta untuk 2022 nanti belum ada pembahasan. Hal itu dikarenakan DPRD Provinsi DKI Jakarta baru saja terkena sanksi administratif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akibat tak menyerahkan APBD perubahan tepat waktu.

“Jadi untuk tahun depan nanti, kita tak bisa menjawab karena belum dibahas. Kita menghadapi terlalu banyak polemik jadi sesuatu yang penting dan mendasar

malah abai. Sehingga, untuk pembahasan APBD murni akan dibahas dua minggu kedepan,” tutur Wibi.

Meski begitu, jika melihat dari kebijakan sebelumnya mengenai anggaran penanggulangan Covid oleh Pemprov DKI Jakarta, lanjut Wibi, penggunaannya dapat dikategorikan Belanja Tak Terduga (BTT). Jadi, secara spesifik kegiatan *refocusing* dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus melibatkan DPRD.

“Mungkin kalau di Kabupaten Cirebon tetap perlu menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi. Tapi kita perlu diskusi lebih lanjut sehingga pengawasan anggaran penanggulangan Covid 19 tetap bisa dilakukan,” terangnya.

Sementara mengenai pengesahan perda penanggulangan Covid 19, Wibi mengungkapkan, sempat beradu argumen saat Pemprov Jakarta mengajukan revisi mengenai sanksi pidana. Pasalnya, ia menilai adanya kebijakan sanksi pidana sangat tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat itu justru tengah kolaps.

“Dari pada menakuti warga masuk penjara, lebih baik kita lebih aktif dan masif melakukan sosialisasi terhadap penanganan Covid ini,” kata Wibi.

Wibi juga mengungkapkan, jika di DKI Jakarta pansus mengenai penanggulangan maupun penanganan kasus Covid 19 sudah dibubarkan setelah Perda disahkan. Kata Wibi, saat ini kebijakan yang tengah digodok Provinsi DKI Jakarta justru fokus pada pansus penanganan banjir.

“Jadi setelah kita menyelesaikan Perda Covid, kita anggap hasil buah pikir DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah *lot and clear*,” tandas Wibi. •Sar

Balong Biru Cimandung

Agar Tak Hilang Pengunjung, Berharap Perbaiki Akses Jalan

Balong Biru Cimandung tak kurang dikunjungi puluhan wisatawan dalam setiap harinya. Meski begitu ada harapan yang muncul dari pengelola agar situs ini tak ditinggal wisatawan.



Tak lepas dari nilai sejarah, Desa Kerandon, Talun, memiliki situs unik yang telah berdiri sejak abad ke 14 bernama Balong Biru Cimandung. Sebuah bendungan kecil yang mulanya adalah petilasan dan tempat mandi keluarga Raden Walangsungsang atau Mbah Kuwu Cirebon.

Jika diperhatikan atau dilihat secara seksama dari sebelah selatan, balong ini memiliki bentuk yang menyerupai lafadz Allah. Sementara jika dilihat dari sebelah utara, nampak seperti tokoh wayangan terkenal Semar.

Meski bernama Balong Biru, bukan berarti air di dalamnya berwarna biru. Hanya saja, sebutan ini diambil dari kisah yang beredar di tengah masyarakat, jika dahulu balong ini merupakan tempat pemandian yang diperuntukkan khusus orang-orang berdarah biru atau keturunan kesultanan.

Berdasarkan cerita leluhur warga desa, asal-muasal Balong ini terekam dari perjalanan Raden Walangsungsang yang sempat transit di Desa Kerandon saat ingin bertemu dengan gurunya bernama Pangeran Sanghiang Bango. Dimana ia tinggal di Gunung Cangkak, tepat berada di dataran atas balong.

“Jadi di sini merupakan petilasan Raden Walangsungsang, Nyi Endang Geulis yang merupakan istrinya dan adiknya Nyimas Rara Santang,” tutur Darson, selaku pengelola wisata religi Balong Biru Cimandung.

Tepat bersebelahan dengan balong, terdapat pohon manggis dan mangga yang usianya sudah ratusan tahun. Namun para warga mempercayai, jika ranting pohonnya belum pernah jatuh sekalipun ke area Balong Biru. Kedua pohon tersebut pun masih sering berbuah dan dipanen oleh sekawanan kera



yang tinggal di pohon.

“Sejak saya kecil batang atau ranting pohonnya belum pernah menyebrang ke area balong. Kami juga membuat pagar di sekelilingnya supaya pohon-pohon itu tetap terjaga,” kata Darson.

Tak hanya itu, di dalam area wisata religi ini juga terdapat tiga sumur yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Masing-masing sumur memiliki julukan, yang melambangkan makna tertentu sehingga keberadaannya hingga saat ini pun masih terus dijaga.

Pertama, Sumur Gua Garba yang kerap kali ramai digunakan untuk pengobatan. Kedua, Sumur Rezeki sebagai pengingat dan anjuran sedekah sebagaimana-

na terdapat hak orang lain dari harta yang dimiliki. Ketiga, Sumur Tetes yang melambangkan harapan agar rezeki terus menetes seperti air.

Hingga saat ini, wisata religi ini telah mampu mengundang banyak pengunjung. Sedikitnya 50 orang yang datang dalam setiap harinya. Mulai dari wisatawan lokal, provinsi bahkan mancanegara seperti Singapura, Kanada, Belgia hingga Oman. Kebanyakan mereka datang dengan tujuan mengenal sejarah penyebaran Islam di tanah Cirebon.

“Alhamdulillah ramai terus bahkan pengunjung dari luar negeri juga ada, orangnya tinggi-tinggi dan ngomongnya pakai bahasa Inggris. Belum lama ini,

saya mengantar pengunjung asal Belgia naik ke atas Gunung Cangkak kemudian mandi di Balong Biru ini,” kata Darson.

Namun, Darson menyayangkan, pengunjung yang datang untuk berziarah ke wisata religi ini tak seramai dulu. Salah satu penyebabnya, kata Darson, karena semakin sempitnya jalan menuju lokasi. Sehingga, bus-bus peziarah tak dapat akses masuk. Terlebih jarak lokasi ini cukup jauh dari jalan besar.

Selain itu, minimnya fasilitas kebersihan juga dirasa menjadi faktor. Seperti belum adanya tempat sampah, meski sebenarnya pihak pengelola telah mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah, kondisi tanah yang becek dan licin ketika hujan mulai turun hingga lahan parkir yang belum tertata rapih menjadi penyebab para pengunjung menjadi berkurang.

“Selama ini perbaikan area wisata berasal dari pengunjung yang *nyalam* ke kuncen. Di sini tidak tarif masuk maupun karcis untuk parkir. Pemdes pernah ada wacana bikin karcis parkir, tapi sampai sekarang belum jalan, padahal kalau rapih juga kan bisa buat pemasukan warga atau desa,” keluh Darson.

Ia pun berharap, untuk pengembangan wisata religi ini ke depannya bisa lebih mendapat perhatian dari Pemda Kabupaten Cirebon maupun Pemdes Kerandon. Tak lain agar bisa semakin merawat, melestarikan dan memajukan potensi yang ada ini sebagai cagar budaya.

“Kita berharap untuk ditingkatkan dan diperhatikan. Ini juga bisa dijadikan sebagai aset desa untuk memberi pemasukan PAD. Selain itu juga supaya desa kita ini bisa dilihat oleh desa lain,” tutupnya. •Sar

Gebang Kulon

Bangun Panorama Unik Instagramble

Meski baru tahap awal sebagai perkawinan dua situs, area panorama Gebang Kulon telah begitu ramai dinikmati para pengunjung. Apa yang menarik?



Andi Subandi (Kuwu Desa Gebang Kulon)

Berkunjunglah ke Desa Gebang Kulon, selain dikenal akan sejarah Keraton Gebang pada masa lampau dan peninggalan Situs Makam Pangeran Sutajaya, desa ini memiliki area unik di pertigaan jalan.

Tepatnya di perbatasan antara Desa Gagasari dan Desa Kalimaro, terdapat area unik dengan latar pematang sawah yang hampir setiap sore di kerumuni orang. Kebanyakan para pengunjung adalah muda-mudi yang membawa gawai sambil mengambil ragam pose foto.

Area yang dinamakan Panorama Alam Gebang Kulon ini ternyata memang *pilot project*

yang dibangun oleh Pemerintah Desa Gebang Kulon.

Meski baru pondasi, pembangunan di tahap pertama ini telah mendapat respon yang baik. Banyak para warga sekitar yang berdatangan. Mereka begitu menikmati area foto selfie di depan latar bertuliskan 'Panorama Gebang Kulon'.

Rencananya, panorama alam itu akan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare dengan menyajikan beberapa spot wahana.

"Mulai dari kafe hingga embung yang berfungsi untuk air pertanian dan pemancingan," ungkap Kuwu Desa Gebang Kulon Andi Subandi.

Andi bermimpi, bisa menga-

winkan wisata alam dan religi di Gebang Kulon. Keyakinan ini ditunjang dengan fakta telah dimulainya pembangunan panorama alam tahap pertama.

"Pembangun tahap pertama kita sudah bangun pondasi dan latar bertuliskan 'Panorama Gebang Kulon' pada bulan kemarin menggunakan anggaran dan desa," tutur Andi.

Tak kurang anggaran sejumlah Rp 150 juta telah Andi gelontorkan untuk membangun panorama. Sebab, ia begitu optimistis, wisata alam dan religi Gebang Kulon akan memberikan kemaslahatan warga dan kemajuan desa. Seperti mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD), memberdayakan pelaku UMKM hingga menyerap tenaga kerja nantinya.

Meski begitu, untuk membangun wisata panorama yang lebih besar, tak mudah bila hanya mengandalkan dana desa. Untuk itu, Andi sudah mencari dana tambahan ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun melalui dana CSR Bank Indonesia.

"Saya hanya berharap pihak yang telah kita datangi bisa survei ke lokasi pembangunan wisata dan memberikan bantuan. Kita sudah ajukan. Tapi belum ada tindak lanjut. Mungkin karena masih keadaan pandemi. Kami sabar menunggu saja," tandasnya. •Muiz

Setupatok Terkenal Jadi Sentra Industri Rempah

Setupatok memang bukan desa yang memiliki lahan pertanian luas. Namun ada banyak industri rempah rumahan yang cukup besar dan telah dikenal. Bagaimana bisa?



Roeddy (Sekdes Desa Setupatok)

Desa Setupatok, Kecamatan Mundu bagi kebanyakan orang terkenal dengan keindahan potensi alamnya. Terutama keberadaan danau di balik bukit yang tak pernah sepi pengunjung.

Namun di luar itu, Desa Setupatok juga dikenal memiliki berbagai sektor industri perumahan yang memproduksi macam-macam rempah.

Ada sembilan *home industry* yang hingga saat ini telah memproduksi bumbu-bumbu.

Para pemiliknya pun bukan orang lain melainkan warga asli Setupatok.

Maka tak heran, jika mayoritas penduduk desa pun bermat-

apencaharian sebagai pedagang rempah dapur. Baik rempah utuh maupun olahan bumbu yang sudah siap untuk dimasak nantinya.

“Hampir 60 persen dari jumlah 11 ribu warga kami merupakan pedagang rempah. Sebagian dari mereka jualannya di luar desa. Dan kemungkinan di sini menjadi sentra industri rempah terbesar di Kecamatan Mundu,” ungkap Roeddy, Sekretaris Desa Setupatok.

Industri rempah rumahan ini pun bukan barang baru. Pasalnya, kata Roeddy, sudah berlangsung sejak puluhan tahun lamanya. Bahkan, usaha ini telah diwariskan turun-menurun.

Aneka rempah itu pun telah terjual ke berbagai daerah. Dari antar kota seperti Bandung, Jakarta hingga Pulau Sulawesi. Dalam seharinya, perputaran omzetnya telah mencapai ratusan juta.

“Apalagi kalau di Jawa Barat sudah tidak aneh lagi, kami sudah menguasai pasarnya,” kata Roeddy.

Maka tak ayal, keberadaan industri bumbu ini pun telah mampu menggerakkan perekonomian warga Setupatok. Mereka merasa terbantu dengan terbukanya pekerjaan di gudang-gudang rempah. Tak sedikit para pekerja merupakan ibu muda hingga para remaja.

“Kami selaku pemdes juga sangat bersyukur sekali, minimalnya bisa mengurangi angka pengangguran terlebih masih dalam suasana pandemi seperti ini. Ketika warga merasa terbantu, kami pun merasa terbantu. Meski belum bisa berkontribusi untuk PAD,” tutur Roeddy.

Oleh karena itu, Roeddy mengaku terus berupaya mendukung agar industri rempah milik warga ini tetap dapat beroperasi dengan lancar. Salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.

“Saat ini kita juga sedang rambat beton, biar enak keluar masuknya mobil-mobil yang membawa muatan rempah,” tuturnya. •Sar

Karangsembung

Dalam 2 Tahun Targetkan Revitalisasi Pasar

Pasar Karangsembung memiliki tata letak yang tak beraturan. Alhasil Pemdes Karangsembung akan fokus pada pembenahan dalam 2 tahun kedepan.



Suwanda Kuwu Karangsembung

Masyarakat Desa Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, telah lama merasakan keresahan dengan kondisi Pasar Karangsembung yang begitu semrawut. Pasalnya seiring waktu pasar andalan desa ini, memiliki tata letak yang tumpah-ruah hingga ke jalan.

Alhasil para warga sekitar maupun pengguna jalan, seringkali harus antri ketika ingin melintasi jalan di depan pasar karena banyaknya pedagang dan

parkir kendaraan di bahu jalan.

Selain itu, lokasinya yang berdekatan dengan kantor desa juga cukup menghambat jalannya fungsi kerja pemerintahan desa. Oleh karena itu, Pemdes Karangsembung pun tengah menginisiasi pembenahan untuk mulai menata pasar.

“Kita akan mulai pembenahan Pasar Karangsembung dengan konsep baru agar tak lagi mengganggu bagi pengguna jalan karena banyak pedagang yang tumpah hingga ke jalan,” jelas Kuwu Desa Karangsembung Suwanda.

Merespon itu, para warga pun menyambut baik rencana yang digagas Pemdes Karangsembung.

“Memang perlu ada pembenahan, karena dari tata letak, pedagang hingga tempat parkir sangat mengganggu bagi kita yang ingin ke kantor desa juga,” ujar Riyan, warga Karangsembung.

Langkah konkretnya, Suwanda akan mulai membangun infrastruktur dan prasarana pasar. Ia akan melakukan perubahan tata letak pasar agar tak menutupi halaman depan kantor desa.

“Kita sudah bahas dalam rapat desa lalu. Dan akan segera dibuat *grand design*-nya,” terang Suwanda.

Suwanda menargetkan, program pembenahan ini akan dapat diselesaikan dalam jangka dua tahun kedepan dan akan dimulai pada 2022 nanti. Ia menceritakan, jika tahun ini Pemdes Karangsembung hanya fokus pada penanganan pandemi sehingga baru akan direalisasikan.

Ia berharap, revitalisasi pasar juga akan mampu mendongkrak lagi pundi-pundi Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui retribusi.

“Untuk saat ini PAD total kita Rp 136 juta per tahun, salah satunya dari retribusi pasar sebesar Rp 20 juta dalam setiap tahun. Semoga kedepan bisa lebih ditingkatkan lagi setelah revitalisasi,” pungkas Suwanda. •Lan

Semplo

Tekad Ubah Wajah Desa Tertinggal

Telah lama dianggap desa tertinggal, Pemerintah Desa Semplo kian gencar membangun fasilitas desa agar bergeser menjadi desa mandiri. Apa saja langkahnya?



Maulana (Kuwu Desa Semplo)

Tidak banyak yang mengetahui tentang salah satu desa di Kecamatan Palimanan ini. Desa yang berpenduduk kurang dari 5 ribu jiwa ini, kini tengah merintis untuk menjadi desa mandiri. Pasalnya, desa ini kerap kali dianggap desa yang tertinggal.

Untuk menepis anggapan desa tertinggal, Pemerintah Desa (Pemdes) Semplo kini mulai melakukan beberapa perubahan untuk membangun dan mengembangkan potensi desa menuju desa mandiri. Tahap pertama yakni program perbaikan infrastruktur dan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu)

dan fasilitas desa lainnya.

“Alhamdulillah, dari program tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga desa karena fasilitas seperti musala dan jalan sudah diperbaiki,” ujar Kuwu Desa Semplo Maulana saat ditemui Cirebon Katon.

Selain itu, ada pula program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang merupakan sarana untuk memupuk dan menumbuhkan kembangkan persatuan, solidaritas sosial, kekompakan dan keterpaduan semangat bergotong-royong antara TNI, unsur Pemdes dan warga masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan masya-

rahat dan lingkungan.

Untuk mempercepat mengubah wajah desa tertinggal, Pemdes Semplo telah merencanakan pembangunan untuk rehabilitasi kantor pelayanan desa, pembenahan lapangan bola serta mendirikan beberapa kios di samping lapangan bola melalui anggaran dana desa (ADD).

“Rencananya kita akan mulai realisasikan di tahun depan,” terang Maulana.

Khusus pembangunan kios, kata Maulana, bertujuan untuk menunjang perekonomian warga di Desa Semplo agar bisa mewadahi para pengusaha kecil dan menengah.

“Kedepannya, kios itu juga dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk menjual produk ekonomi desa dan UMKM,” jelas Maulana.

Sementara sebagai penunjangnya, telah disiapkan program Kotaku dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) dari Kementerian PUPR. Namun, program tersebut baru akan dilaksanakan pada 2022 nanti.

“Program dari PUPR itu meliputi pembangunan jalan desa, jalan air dan perbaikan Rutilahu,” kata Maulana.

Maulana hanya berharap rencana dan usaha besar itu dapat menjadi wasilah agar mimpi desa mandiri bisa terwujud. • Soy



Kalah Garam

Kita kerap mendengar atau mungkin berkata 'banyak makan (asam) garam' atau 'membuang garam ke laut.' Kata garam dalam peribahasa itu diartikan sebagai: pengetahuan, ilmu, atau pengalaman. Tapi bagaimana dengan ungkapan 'kalah garam' atau 'kalah uyah'?

Bisa jadi artinya sama dengan peribahasa tersebut, bisa juga berarti garam yang sesungguhnya. Nah, dua makna itu sepertinya kini sedang menimpa Kabupaten Cirebon. Kok bisa? Bisa tentu saja, bahkan sudah dan sedang terjadi.

Anda boleh setuju, boleh tidak. Mari kita lihat fakta saja. Potensi produksi garam di Kabupaten Cirebon cukup besar, terdapat lahan tambak garam seluas 1.557 hektare. Membentang dari Kapetakan hingga Losari.

Pada 2020, total produksi garam di Kabupaten Cirebon hanya 2.670 ton. Berarti kemampuan satu hektare lahan rata-rata hanya menghasilkan 1,72 ton dalam setahun.

Sungguh angka yang kecil. Padahal pada 2015 sempat mencapai angka 435.000 ton per tahun. Aktivitas petambak garam yang berjumlah 3.020 itu pun terus merosot, dari 120 kelompok usaha garam (kugar), kini hanya 37 kugar yang aktif.

Sangat disayangkan. Padahal kebutuhan nasional akan garam cukup tinggi. Data Kemendag menunjukkan bahwa pada 2021, total kebutuhan garam nasional sebesar 4.606.554 ton. Sementara kemampuan produksi nasional hanya 1.528.653 ton.

Artinya hanya sepertiga yang mampu dipenuhi produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, sisanya masih impor. Jelas ini peluang usaha yang sangat besar. Juga peluang pemerintah daerah untuk menggenjot produksi, demi meningkatkan taraf ekonomi lokal.

Menyadari akan besarnya kebutuhan pasar itu, Kabupaten Pamekasan pada 2018 merangkul perguruan tinggi setempat mengembangkan teknologi pengolahan garam. Bersama Universitas Trunojoyo Madura, Pemkab berhasil meningkatkan produksi garam tiga kali lipat. Waktu produksi pun bisa

dipersingkat biasanya 8-10 hari, dengan teknologi terapan hanya butuh waktu 3-4 hari saja.

Pada tahun 2020, dengan lahan yang hanya 913,5 hektar, Kabupaten Pamekasan mampu menghasilkan 30.726 ton. Rata-rata per hektar bisa memproduksi 30 ton. Sungguh angka yang jauh jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon yang hanya 1,7 ton per hektar.

Peluang emas bisnis garam juga ditangkap Kabupaten Brebes. Pada 2021 mengalokasikan investasi sebesar Rp 80 miliar untuk membuat pabrik pengolahan garam standar industri. Pabrik ini berkapasitas 30-50 ton per hari.

Menariknya, pembuatan pabrik pengolahan garam standar industri itu untuk memenuhi kebutuhan garam di Kawasan Industri Brebes (KIB). Artinya pemerintah Kabupaten Brebes merencanakannya secara terintegrasi.

Selain itu, di tingkat petambak, Pemkab Brebes pun menerapkan teknologi *washing plant* untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi petambak. Dari sisi luasan lahan, di Brebes hanya 1.456 hektar, dengan jumlah petambak garam sebanyak 658 orang.

Dari sisi potensi luasan lahan dan jumlah petambak, Kabupaten Cirebon tentu saja unggul dibanding Pamekasan dan Brebes. Namun, kenapa Kabupaten Cirebon masih kalah garam, dari sisi kuantitas dan kualitas produksi?

Jawabannya, karena Kabupaten Cirebon masih 'kalah garam', yakni kalah pengetahuan, kalah teknologi. Pengetahuan dan teknologi, di era keterbukaan informasi saat ini, sebenarnya bukanlah hal yang sulit didapat.

Masalahnya adalah kemampuan kita membaca angka, data, potensi, dan peluang yang ada. Kemampuan ini akan semakin terdongkrak jika kita punya perhatian yang besar untuk memajukan Cirebon dari berbagai sisi. Mari kita lakukan bersama. Ini prasyarat dasar. Sehingga ke depan, tidak ada lagi cerita 'kalah garam' bagi Kabupaten Cirebon.



**SEKRETARIS DPRD
DAN SELURUH PEGAWAI**

Mengucapkan:



**Selamat Hari
PAHLAWAN
NASIONAL**

1 0 N O V E M B E R



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Mengucapkan:

Selamat Hari

PAHLAWAN NASIONAL



10 NOVEMBER

